



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/KMK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,  
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: B-97/MA/KU.00.1/04/2016 tanggal 7 April 2016, telah mengajukan usulan penetapan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM. MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

PERTAMA

: Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

KETIGA

: Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.
- KELIMA : Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan memperhatikan golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KEENAM : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNBP.
- KETUJUH : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.
- KESEMBILAN : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non PNS yang bersumber dari RM dan/atau PNBP.
- KESEPULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KESEBELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDUABELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNPB berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- KETIGABELAS : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.
- KEEMPATBELAS : Khusus untuk Rektor, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik dapat diperhitungkan dengan pemberian tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHBELAS : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, Rektor dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KEDELAPANBELAS : Khusus untuk Rektor, dalam hal capaian KPI Rektor melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Rektor dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEMBILANBELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor;
  - Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor; dan
  - Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor.
- KEDUAPULUH : Insentif kinerja Rektor yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Rektor dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUHSATU : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHDUA : Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi bulan ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.
- KEDUAPULUHTIGA : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bagi yang berstatus PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Bagi yang berstatus Non PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari PNBP dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUHEMPAT : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHLIMA : Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHENAM : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KEDUAPULUHTUJUH : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Agama;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
7. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kementerian Agama;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

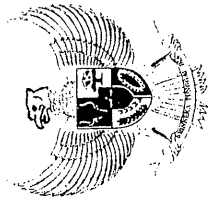
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

*Handwritten mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

(dalam Rupiah/per bulan)

NO	JABATAN	HONORARIUM	INSENTIF		TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL
			MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	3	4	5	
1	Ketua Dewan Pengawas	3.179.000	0	s.d. 7.417.000	10.596.000
2	Anggota Dewan Pengawas	2.861.000	0	s.d. 6.675.000	9.536.000
3	Sekretaris Dewan Pengawas	1.192.000	0	s.d. 2.781.000	3.973.000

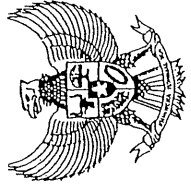
DAFTAR REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

(dalam Rupiah/per bulan)

NO	JABATAN	GAJI	INSENTIF *)		TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL
			MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	3	4	5	
1	Rektor	21.077.000	4.636.000	s.d. 27.814.000	48.891.000
2	Grade 16	17.297.000	3.775.000	s.d. 22.652.000	39.949.000
3	Grade 15	15.911.000	3.021.000	s.d. 18.123.000	34.034.000
4	Grade 14	12.948.000	2.235.000	s.d. 13.413.000	26.361.000
5	Grade 13	8.792.000	1.509.000	s.d. 9.056.000	17.848.000
6	Grade 12	8.501.000	1.382.000	s.d. 11.052.000	19.553.000

A





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO	JABATAN	GAJI	INSENTIF *)		TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL
			MINIMAL	MAKSIMAL	
7	Grade 11	8.168.000	1.195.000 s.d.	7.173.000	15.341.000
8	Grade 10	7.286.000	972.000 s.d.	5.833.000	13.119.000
9	Grade 9	6.881.000	905.000 s.d.	7.243.000	14.124.000
10	Grade 8	7.012.000	805.000 s.d.	6.443.000	13.455.000
11	Grade 7	6.167.000	724.000 s.d.	5.789.000	11.956.000
12	Grade 6	5.833.000	650.000 s.d.	3.902.000	9.735.000
13	Grade 5	5.721.000	584.000 s.d.	3.503.000	9.224.000
14	Grade 4	5.234.000	527.000 s.d.	3.160.000	8.394.000
15	Grade 3	4.629.000	483.000 s.d.	2.896.000	7.525.000
16	Grade 2	4.076.000	361.000 s.d.	2.165.000	6.241.000
17	Grade 1	3.810.000	309.000 s.d.	1.854.000	5.664.000

Keterangan:

\*) insentif dengan capaian KPI = 100%, Rektor sebesar Rp18.542.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001